

PERENCANAAN DALAM PENDIDIKAN

Siti Aisyah¹

Abstract: This paper discusses planning in education. Educational planning is the basis of implementation in education by looking at the future that will be done to develop order to be more effective and efficient in accordance with the needs of the community to achieve development targets, which can be relied upon. Good planning must be able to provide answers to the concept of questions formulated in six questions, namely: what, why, where, when, who, what, what will be planned. The type in the process can be used in terms of time, namely the long term, win and short term planning, based on scope, macro, meso, and micro, as well as approaches based on education levels. The planning process starts from the preparation of program plans, implementation of plans, supervision and evaluation. Through good planning in education, the results that are expected to achieve.

Keywords: Planning and education

Perencanaan merupakan titik awal dalam dalam melakukan suatu kegiatan. Perencanaan akan memberikan arah, menjadi standar kerja, memberi kerangka pemersatu dan membantu memperkirakan peluang yang ada. Dalam melaksanakan suatu kegiatan baik kecil maupun besar dalam suatu lembaga harus melalui perencanaan, khususnya dalam organisasi pendidikan yaitu sekolah. Pendidikan merupakan ujung tombak dari keberhasilan, maka pendidikan pun harus direncanakan sebelum dilaksanakan agar memperoleh hasil sesuai apa yang diharapkan. Untuk meraih keberhasilan dalam pendidikan tidaklah lepas dari perencanaan, karena dalam perencanaan-perencanaan itulah disusun target-target atau harapan-harapan dan juga metode-metode yang akan digunakan untuk

¹ Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Bone

mencapai tujuan pendidikan itu agar menghasilkan produk yang maksimal. Oleh karena itu, Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi khususnya dalam pendidikan.

A. Pengertian Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat kemasa yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan juga dapat terwujud sesuai harapan.

Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang, perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi strategis perencanaan dalam sebuah lembaga dalam perencanaan merupakan proses yang dikerjakan oleh seseorang

Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial dan aspek kebangsaan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi

fisik dan nonfisik; dengan potensi-potensi tersebut manusia mampu berkarya dan berbudi pekerti luhur.

Berdasarkan sejarah yang ada bahwa perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia memiliki masa pembabakan perencanaan pendidikan dimulai tahun pada tahun 1969 sebagai asal mula perencanaan pendidikan di Indonesia. Pembabakan selanjutnya adalah periode tahun 1969 sampai tahun 1974, perencanaan pendidikan periode 1975 sampai tahun 1979, perencanaan pendidikan periode 1980 sampai 1998, dan perencanaan pendidikan periode 1998 sampai sekarang. Dalam setiap babak, perencanaan pendidikan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.²

B. Karakteristik Perencanaan

Karakteristik perencanaan pendidikan secara dinamis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu proses rasional dikarakteristikkan sebagai pengembangan yang terorganisasi dari kegiatan pembelajaran masyarakat.
2. Menyangkut tujuan sosial, cara, dan tujuan, proses, dan kontrol.
3. Merupakan rancangan konseptual kebijakan dan tindakan dibuat oleh kelompok.

²Martin, *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan* (Cet, I; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013), h. 35-36.

4. Konsep dinamis yang menjamin rencana dikonstruksi dengan lentur sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan.³

Lebih spesifik, Afifuddin menambahkan beberapa syarat perencanaan pendidikan sebagai pelengkap karakteristiknya antara lain:

1. Rencana mempermudah tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Rencana bersifat luwes dan fleksibel, dalam arti mengandung kemungkinan untuk perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dan situasi yang terjadi.
3. Pragmatis yang bersifat praktis disertai dengan perhitungan logis dan rasional, disusun berdasarkan fakta dan data, bukan merupakan hayalan atau dugaan-dugaan.
4. Rencana bersifat sederhana, sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh para pelaksana.
5. Ada skala prioritas berdasarkan kondisi sarana dan prasarana (*man, money, machine, method, market*).
6. Rencana mempunyai daya guna, dalam arti hasil suatu rencana benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, baik diri sendiri maupun bagi lembaga atau masyarakat umumnya.⁴

³Sarbini dan Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 228.

⁴Sarbini dan Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan* h. 230.

Perencanaan yang baik harus dapat memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan dalam enam pertanyaan, yaitu: *what, why, where, when, who, how*, seperti berikut:

1. *What*, menanyakan tujuan, rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. *Why*, menanyakan sebab-sebab jenis kegiatan itu yang harus dilakukan. Jawaban pertanyaan ini memberikan argumentasi, alasan-alasan pembuatan perencanaan itu sehingga memperoleh pengertian yang lebih jelas dan terperinci tentang latar belakang pemikiran perencanaan tersebut.
3. *Where*, menanyakan hal yang berhubungan dengan lokasi atau tempat rencana itu akan dilaksanakan. Hal ini mencakup letak, tata ruang, tingkat pelaksanaan suatu rencana, danlainnya.
4. *When*, menanyakan hal yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan rencana itu. Hal ini mencakup prioritas, fase pencapaian, bahkan jangka pencapaian tujuan dari rencana tersebut.
5. *Who*, menanyakan orang yang akan bertanggungjawab, yang akan melaksanakan dan mengawasi. Hal ini mencakup juga wewenang dan tanggungjawab, hierarki, syarat-syarat personal, pembagian tugas, pengadaan tenaga, penempatan, dan pembinaannya.
6. *How*, menanyakan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, mencakup sistem dan tata kerja, standar yang harus dipenuhi, iklim sekitar lokasi, pembiayaan, dan lain-lain.

C. Prinsip-Prinsip Umum Perencanaan Pendidikan

Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang harus dilakukan atau dipertimbangkan oleh para perencanaan ketika akan menyusun rencana pendidikan. Perencanaan pendidikan itu harus memperhitungkan prinsip-prinsip:

1. Komprehensif, yaitu melihat masalah pendidikan sebagai keseluruhan, setiap aspek pendidikan harus mendapatkan perhatian sewajarnya baik formal maupun non formal pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dalam arti yang seluas-luasnya.
2. Integral, yaitu perencanaan pendidikan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan yang menyeluruh. Sifat integrasi ini harus yang sudah tampak di dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan.
3. Efisien, yaitu biaya yang terbatas harus diusahakan seefisien mungkin dalam penggunaannya dan fokus dalam pengelolaannya.
4. Interdisipliner, yaitu harus mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan karena pendidikan itu sendiri sesungguhnya interdisipliner terutama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia.
5. Fleksibel, yaitu tidak kaku tetapi dinamis dan responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan.
6. Objektif rasional, yaitu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat saja.

7. Kelengkapan dan kaakuratan data, yaitu perencanaan harus disusun berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan akurat, karena jika tidak akan memiliki kekuatan yang dapat diandalkan.
8. Kontinyu, yaitu perencanaan pendidikan itu harus memperhatikan aspek keberlangsungan strategi yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan pendidikan.⁵

D. Jenis-Jenis Pendekatan Perencanaan Pendidikan

Perencanaan Pendidikan sangat dekat kaitannya dengan struktur penduduknya. Ada empat pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya yaitu:

1. Pendekatan Kebutuhan Sosial (*Social Demand Approach*)

Pendekatan kebutuhan sosial adalah pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendidikan ini menitik beratkan kepada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Bila pendekatan ini dipergunakan, maka tugas para perencana pendidikan harus memperkirakan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan menganalisa:

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Partisipasi dalam pendidikan (yakni dengan menghitung persentase penduduk yang bersekolah)

⁵Martin, *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidika*, h. 22.

- c. Arus murid dari satu kelas ke kelas yang lebih tinggi dan dari satu tingkat ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi (misalnya dari SD ke SLTP ke SMA dan ke perguruan tinggi).
- d. Pilihan atau keinginan masyarakat dari individu tentang jenis-jenis pendidikan.

Ada tiga kelemahan pendekatan kebutuhan sosial, yaitu:

- a. Pendekatan ini mengabaikan masalah alokasi sumber dalam skala nasional, dan secara implisit tidak mempermasalahkan berapa besar sumber yang diperuntukkan bagi pendidikan. Karena beranggapan bahwa penggunaan sumber itulah yang terbaik bagi pembangunan bangsa.
- b. Pendekatan ini mengabaikan ciri-ciri dan pola kebutuhan *man power* yang diperlukan di sektor kehidupan ekonomi, dengan demikian akan cenderung menghasilkan tamatan yang sebenarnya kurang diperlukan dan justru akan kekurangan jenis tamatan yang dibutuhkan.
- c. Pendekatan ini cenderung berlaku menjawab tuntutan saja, sehingga mengabaikan pertimbangan pembiayaan, sehingga pemerataan sumber-sumber itu menjadi kecil akibatnya tuntutan kualitas dan efektivitas pendidikan tidak tercapai yang berarti pemborosan.⁶

2. Pendekatan Ketenagakerjaan

⁶Udin Syaefudin Sa'ud, *Perencanaan Pendidikan* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 235-236.

Pendekatan ketenagakerjaan adalah pendekatan yang mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan kebutuhan tenaga kerja. Pendekatan ketennagakerjaan mempunyai tiga kelemahan, yaitu:

- a. Mempunyai peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan, karena pendekatan ini lebih mengutamakan sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.
- b. Menggunakan klasifikasi dan rasio permintaan dan persediaan.
- c. Tujuan utamanya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, disisi lain tuntutan dunia kerja selalu berubah-ubah dengan cepatnya.

3. Pendekatan Keefektifan Biaya

Pendekatan ini menitikberatkan pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendidikan ini hanya diadakan jika memberikan keuntungan yang relatif pasti, baik bagi penyelenggara maupun peserta didik. Sebagai contoh: pembukaan sekolah-sekolah Magister Manajemen, Magister Bisnis Administrasi, dan kursus-kursus. Kelemahan pendekatan ini adalah pengelolaan dana pendidikan terutama di negara berkembang masih sangat lemah.

4. Pendekatan Terpadu

Pendekatan terpadu merupakan suatu kerangka ilmu pengetahuan yang dapat memadukan berbagai pendekatan yang sifatnya persial menjadi suatu pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu.

Pendekatan terpadu perencanaan pendidikan yang secara teoritik selama ini ada yaitu:

- a. Pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan social
- b. Pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan tenaga kerjaan dan
- c. Pendekatan perencanaan pendidikan berdasarkan keefektifitaan biaya.

Untuk dapat memadukan ketiga pendekatan dalam perencanaan pendidikan diperlukan suatu pendekatan perencanaan yang memiliki karakteristik sistemik, analitik, dan sistematis. Sistemik dalam arti permasalahan dilihat dari konteks keseluruhan. Analitik dalam arti setiap permasalahan dianalisis sebab dan akibatnya dikaitkan dengan berbagai masalah yang ada baik di dalam maupun di luar sistem. Sistematis dalam arti cara kerjanya beraturan atau runtut. Hal ini dapat dilihat dari proses kegiatannya yaitu perumusan masalah, penelitian, penilaian, penelaahan, pemeriksaan, dan pelaksanaan.⁷

E. Tipe-tipe Perencanaan

Ada beberapa tipe perencanaan dalam pendidikan.

1. Tipe perencanaan dari segi waktu

Ditinjau dari segi waktu, ada tiga tipe perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang minimal 10 tahun, jangka menengah di atas 1

⁷Udin Syaefudin Sa'ud, *Perencanaan Pendidikan* h. 238.

tahun sampai 5 tahun, dan jangka pendek maksimal 1 tahun. Di Indonesia, perencanaan tipe ini disamakan dengan program pelita. Jangka panjang ialah sekitar 5 sampai 6 pelita, yaitu 25 sampai dengan 30 tahun, sebagai rambu-rambu untuk tinggal landas. Perencanaan jangka menengah ialah 5 tahun, yaitu 1 pelita. Adapun perencanaan jangka pendek adalah 1 tahun, yaitu 1 tahun anggaran.

Ketiga perencanaan ini saling berkaitan satu dan lainnya. perencanaan jangka panjang menjadi induk dari kedua tipe yang lain. Perencanaan jangka menengah menjadi sumber dari perencanaan jangka pendek. Dengan kata lain, perencanaan jangka pendek harus dijabarkan dari perencanaan menengah dan perencanaan jangka panjang.⁸

2. Tipe perencanaan dari segi ruang lingkup

Perencanaan dari segi ruang lingkup dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu perencanaan makro, meso, dan mikro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang mencakup pendidikan seluruh bangsa, sedangkan perencanaan meso mencakup wilayah tertentu, dan perencanaan mikro hanya mencakup satu lembaga pendidikan atau sekelompok kecil lembaga yang hampir sama dan berdekatan tempatnya.

3. Tipe perencanaan dari segi jenjang pendidikan

Jenjang pertama atau *primary basic education*, jenjang kedua disebut *secondary education*, dan jenjang ketiga atau *tertiary education*. Dari segi jumlah tahun, setiap jenjang itu bervariasi Perencanaan

⁸Sarbini & Neneng Lina, *Perencanaan* h. 89.

pendidikan apabila dikaitkan dengan struktur kependudukan, terdapat kaitan yang amat erat yaitu kelompok usia 6-15 tahun untuk jenjang *primary basic education*, 16-18 tahun untuk *secondary education*, dan 19-25 tahun untuk jenjang *tertiary education*. Keterkaitan ini sangat beragam karena pada setiap negara, usia populasi sekolah yang memasuki pendidikan bervariasi walaupun berkisar pada distribusi di atas. Umumnya distribusi tersebut dianggap sebagai *general accepted standards* dalam perencanaan pendidikan.

Di Indonesia, variasi itu mencakup *technical* dan *vocational education* pada jenjang kedua, dan variasi adanya institute, universitas, akademi, dan politeknik pada jenjang ketiga, dengan variasi lama studi 4 tahun untuk masing-masing termasuk institute dan universitas dan 3 tahun untuk akademik.

Saat ini, pemerintah telah menggalakkan sekolah usia dini yang dikenal dengan PAUD yang selanjutnya meningkat kepada Taman Kanak-kanak (TK). Dua bentuk pendidikan ini sebagai langkah awal sebelum memasuki sekolah dasar.⁹

F. Proses Perencanaan Pendidikan

Perencanaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, kecuali diketahui pula cara atau memulai sebuah perencanaan. Tanpa adanya proses, mustahil sebuah perencanaan akan tercapai.

⁹Sarbini & Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan* h. 91.

Secara spesifik Bintoro Tjokroaminodjojo mengemukakan tahap-tahap proses perencanaan, termasuk dalam perencanaan pendidikan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana
 - a. Tinjauan keadaan.
 - b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana (*forecasting*).
 - c. Penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut.
 - d. Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.
 - e. Persetujuan rencana.
2. Penyusunan program rencana

Dalam tahap ini, dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan. Pengesahan rencana juga diperlukan agar mempunyai kedudukan legal untuk pelaksanaannya. Tahap ini perlu dibantu dengan penyusunan suatu *flow chart* atau *network planning*.

3. Pelaksanaan rencana

Dalam perencanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. kebijaksanaan pun perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian.

4. Tahap berikutnya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana.

Tujuan pengawasan adalah :

- a. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana sesuai dengan rencananya.
 - b. Apabila terdapat penyimpangan, perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
 - c. Dilakukanya tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan. Untuk ini, diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik dari pelaksanaan rencana.
5. Dalam proses perencanaan perlu dilakukan pula evaluasi. Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. dalam ha ini dilakukan suatu evaluasi atau suatu tinjau yang berjalan secara terus menerus. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau sesuai yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan.¹⁰

G. Pelaksanaan Perencanaan Pendidikan di Lapangan

Proses perencanaan pendidikan dalam pembangunan, yaitu pembangunan pendidikan di Indonesia. Tujuan utama perencanaannya diarahkan pada relevansi, efisiensi dan efektifitas pendidikan, sehingga

¹⁰ Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 64.

sasaran pendidikan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Akan tetapi, tataran implementasi yang telah digariskan sering berbeda dengan kenyataan dilapangan, sehingga optimalisasi kinerja manajemen pendidikan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Langkah kerja awal esensial yang harus dilaksanakan oleh para perencana pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Desentralisasi manajemen pendidikan

Implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya, perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan serta memberdayakan sumber daya manusia yang menekankan pada profesionalisme.

2. Keseluruhan proses pendidikan

Perencanaan pendidikan untuk memberikan kejelasan arah dalam usaha, proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan kejelasan arah ini manajemen usaha pendidikan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Mengingat pentingnya posisi perencanaan pendidikan dalam manajemen penyelenggaraan proses pendidikan, perencanaan pendidikan pada semua tataran (struktur, institusional, dan operasional) dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas dalam menyusun sebuah rancangan

yang dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.

3. Mengidentifikasi SWOT

Perencanaan pendidikan harus mampu mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) yang akan mempengaruhi proses perencanaan, seperti memahami sifat-sifat dasar manusia. Memahami kebutuhan dasar manusia, menguasai berbagai jenis pendekatan dalam perencanaan sistem, memformulasikan rencana pendidikan yang berorientasi pada aspek fisik, manajemen, dan kurikulum dan sesuai dengan aspek-aspek lingkungan politik, dan ekonomi yang berlaku pada suatu tempat.

4. Bidang telaah yang harus dikaji

Bidang ini mencakup biaya sistem serta sub-sub wilayah sistem, mengumpulkan data, mengelola data, dan meramalkan masa depan pendidikan. Pada saat ini sistem pendidikan yang berlaku adalah *organized effort* yang berperang sebagai aset dalam kegiatan pembangunan pendidikan. Melalui sistem pendidikan itulah, segala kegiatan perencanaan dilaksanakan. Melalui sistem itu pulalah, seluruh upaya pembangunan pendidikan diwujudkan.¹¹

H. Penutup

Perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat kemasa yang akan datang untuk

¹¹Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan* h. 67.

mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan juga dapat terwujud sesuai harapan.

Perencanaan yang baik harus dapat memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan dalam enam pertanyaan, yaitu: *what, why, where, when, who, how*, terhadap apa yang akan direncanakan. Tipe dalam perencanaan dapat berdasarkan pendekatan dari segi waktu, yaitu perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek, berdasarkan ruang lingkup yaitu makro, meso, dan mikro, serta pendekatan berdasarkan jenjang pendidikan. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan rencana, program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan serta evaluasi. Melalui perencanaan yang baik dalam pendidikan, maka hasil yang diharapkan dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

- Lina, Neneng. *Perencanaan Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Martin. *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Cet, I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Sa'ud, Udin Syaefudin. *Perencanaan Pendidikan*. Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2011.
- Sarbini dan Neneng Lina. *Perencanaan Pendidikan*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.